

BAB. IV

KESIMPULAN

Secara garis besar konflik antara Iran dengan Arab Saudi dimulai dengan adanya peristiwa Revolusi Republik Islam Iran 1979. Implikasi dari peristiwa tersebut menggambarkan bahwa Iran memiliki kekuatan terhadap masyarakat Syi'ah untuk menggulingkan kekuasaan rezim monarki di Iran. Lebih lanjut, Arab Saudi harus senantiasa melindungi rezim monarki di Timur Tengah dari penyebaran gagasan revolusioner Islam oleh Iran. Selanjutnya, peristiwa lain yang menjelaskan alasan mengapa Iran dan Arab Saudi berkonflik yaitu adanya perang Iran-Iraq tahun 1980-1988. Adapun perang tersebut membuat Arab Saudi melakukan intervensi untuk melindungi Iraq yang merupakan negara sekutunya dari kebangkitan Syi'ah di Iraq.

Di satu sisi, pemicu lainnya yang dapat berkontribusi dalam menciptakan konflik Iran dan Arab Saudi adalah adanya invasi Iraq oleh Amerika Serikat 2003 yang mampu menggulingkan kekuasaan Saddam Hussein yang juga didalamnya ditemukan perang saudara Sunni dan Syi'ah. Di sisi lain, adanya penggulingan kekuasaan Saddam Hussein dilakukan oleh populasi Syi'ah di Iraq. Untuk itu, hal tersebut merupakan bukti bahwa kebangkitan Syi'ah di Timur Tengah semakin mengancam eksistensi dari Arab Saudi yang merupakan rival Iran.

Setelah adanya invansi Iraq oleh Amerika Serikat tahun 2003, pemicu lainnya yang mendorong Arab Saudi dan Iran memiliki hubungan konflik satu sama lain yaitu adanya fenomena Arab Spring tahun 2010 di Mesir, Bahrain dan Tunisia. Fenomena

tersebut memberikan gambaran mengenai aksi protes yang dilakukan oleh masyarakat untuk menuntut adanya demokrasi di kawasan Timur Tengah. Maka dari itu, hal tersebut membuat Arab Saudi harus mempertahankan kekuasaan rezim monarki khususnya Bahrain.

Selanjutnya, konflik antara Iran dengan Arab Saudi juga terlihat ketika adanya program pengembangan nuklir Iran tahun 2015. Kondisi tersebut dipandang Arab Saudi sebagai ancaman keamanan di regional Timur Tengah. Artinya Arab Saudi semakin khawatir terhadap kekuatan militer Iran terutama yang berkaitan dengan program pengembangan nuklir. Secara garis besar, konflik antara Iran dengan Arab Saudi yang semakin memanas setelah adanya eksekusi mati terhadap Syekh Nimr Al-Nimr tahun 2016 yang merupakan ulama kharismatik Syi'ah.

Adapun pada awalnya konflik antara Iran dengan Arab Saudi dipicu oleh adanya perbedaan paham keagamaan atau sektarianisme Sunni dan Syi'ah. Dalam perkembangannya konflik Iran dan Arab Saudi yang terjadi hingga saat ini, selain dipicu oleh perbedaan paham keagamaan Sunni dan Syi'ah juga dipengaruhi oleh adanya kompetisi secara geopolitik khususnya di regional Timur Tengah. Lebih lanjut, adanya persaingan secara geopolitik yang diikuti oleh Arab Saudi dan Iran dapat dilihat dalam keterlibatan kedua negara tersebut dalam *proxy war* di Suriah, Iraq dan Yaman.

Di satu sisi, ketegangan Iran dan Arab Saudi juga berkontribusi dalam menghambat proses perdamaian di Timur Tengah, sehingga menciptakan kondisi di regional Timur Tengah yang semakin rentan terhadap konflik. Di sisi lain, baik Iran

maupun Arab Saudi berusaha untuk menyebarluaskan pengaruhnya berdasarkan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing negara. Untuk itu, konflik Iran dan Arab Saudi harus segera diselesaikan dengan sedemikian rupa dan senantiasa menggunakan cara yang sifatnya damai.

Terlepas dari hal tersebut bahwasannya Arab Saudi dan Iran akan berusaha untuk mewujudkan kepentingannya, baik melalui kekuatan ekonomi maupun pembentukan aliansi baru. Selanjutnya dalam konteks Timur Tengah, Arab Saudi merupakan negara yang kaya akan minyak mentah dan memiliki cadangan devisa yang cukup besar. Adanya kondisi tersebut dapat dimanfaatkan Arab Saudi sebagai instrumen dalam mempengaruhi negara-negara Timur Tengah untuk mendapatkan apa yang dikehendaki oleh Arab Saudi khususnya terhadap Organisasi Kerja sama Islam.

Lebih lanjut, Arab Saudi yang juga merupakan negara anggota Organisasi Kerja sama Islam menginginkan organisasi tersebut secara perlahan dapat mengakomodir kepentingan Arab Saudi. Sehingga Arab Saudi merasa bahwa dalam mencapai hal tersebut membutuhkan usaha yang keras dan berkelanjutan yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap Organisasi Kerja sama Islam. Secara spesifik, berbicara mengenai pengaruh Arab Saudi terutama yang berkaitan dengan Organisasi Kerja sama Islam yaitu sebagai negara pendonor terbesar dalam hal bantuan dana dan dominasinya terutama dalam struktur kelembagaan Organisasi Kerja sama Islam.

Terlepas dari hal tersebut bahwa Arab Saudi mencoba untuk mempertahankan eksistensinya di dalam Organisasi Kerja sama Islam. Selanjutnya adanya pengaruh

Arab Saudi terhadap Organisasi Kerja sama Islam tentunya dimanfaatkan oleh Arab Saudi dalam menyelesaikan konflik dengan Iran. Artinya bahwa Arab Saudi melihat adanya peluang potensial dalam internal kelembagaan OKI untuk membantu Arab Saudi dalam membangun hubungan damai dengan Iran. Di satu sisi, adanya inisiasi hubungan damai dari Arab Saudi yang ditujukan kepada Iran dapat dilihat sebagai usaha untuk membangun proses perdamaian di Timur Tengah. Di sisi lain, Organisasi Kerja sama Islam senantiasa memiliki komitmen untuk menyelesaikan konflik terhadap negara anggotanya dalam hal ini Iran dan Arab Saudi menggunakan cara yang damai.

Selanjutnya, Arab Saudi harus memastikan bahwa eksistensi Organisasi Kerja sama Islam mampu memberikan dampak yang cukup positif dalam menunjang kepemimpinan Arab Saudi di dunia Islam khususnya regional Timur Tengah. Maka dari itu dengan adanya hal tersebut dapat membuat Arab Saudi semakin menjadi negara yang berpengaruh dalam menentukan konstelasi politik, ekonomi, sosial dan keamanan di regional Timur Tengah.

Jika Arab Saudi mampu menjadikan Organisasi Kerja sama Islam sebagai mitra dalam normalisasi hubungan damai dengan Iran, maka kondisi ini dapat dijadikan langkah dalam membangun kredibilitas OKI di dalam dunia Internasional. Sebaliknya, jika Arab Saudi gagal memanfaatkan pengaruhnya dalam internal kelembagaan OKI terutama dalam mengatasi konflik, maka dikhawatirkan akan menurunkan rasa ketidakpercayaan terhadap Arab Saudi itu sendiri.

Lebih lanjut, melihat dari hubungan Iran dan Arab Saudi yang mengarah pada konflik tepatnya setelah adanya eksekusi mati terhadap Syekh Nimr Al-Nimr pada tahun 2016 membutuhkan tindakan yang mengarah pada normalisasi hubungan damai. Adapun menurut peneliti, jika dilihat dari teori aktor rasional bahwa Arab Saudi harus menentukan preferensi yang pada akhirnya akan memperoleh hasil yang maksimal. Berbicara mengenai tindakan yang dilakukan oleh Arab Saudi dalam membangun hubungan damai dengan Iran adalah menggunakan pendekatan damai yaitu melalui forum dalam internal kelembagaan Organisasi Kerja sama Islam. Alasan yang mendasari peneliti terkait pemilihan cara yang bersifat damai oleh Arab Saudi karena cenderung akan membawa Arab Saudi memperoleh hasil yang optimal.

Selain itu, alasan lainnya adalah bahwa Arab Saudi mampu mempengaruhi Organisasi Kerja sama Islam melalui pemberian bantuan dana terhadap OKI yang diberikan kepada *Islamic Development Bank (IDB)* yang berbasis di Jeddah. Lebih lanjut, adanya pemberian dana yang juga diterima oleh negara anggota OKI mampu memberikan dampak positif terhadap Arab Saudi yaitu mampu menarik perhatian negara anggota OKI untuk terlibat dalam *Islamic Military Alliance to Fight Terrorism (IMAFT)*. Untuk itu, adanya kerja sama internasional antar negara OKI dalam bidang keamanan tentunya dapat menjadikan Arab Saudi semakin mudah untuk memperoleh aliansi keamanan dalam memberantas organisasi terorisme khususnya di regional Timur Tengah.

Di satu sisi, pemberian bantuan dana oleh Arab Saudi kepada negara anggota Organisasi Kerja sama Islam membuat Arab Saudi dapat sekaligus membangun

hubungan bilateral dalam bidang apapun. Di sisi lain, Arab Saudi secara mayoritas memiliki hubungan bilateral dengan negara anggota OKI dibandingkan Iran. Artinya Arab Saudi memiliki peluang untuk menciptakan suatu front untuk membendung pengaruh dari lawan Arab Saudi khususnya Iran dan sekutunya.

Selain itu, alasan lainnya yang mendorong Arab Saudi untuk meningkatkan pengaruhnya dalam Organisasi Kerja sama Islam yaitu dengan adanya Akademi Fiqh Islam Internasional yang berbasis di Jeddah. Lebih lanjut, lembaga tersebut memiliki peranan penting dalam menetapkan yurisprudensi Islam dan menyebarkan ajaran Islam versi Arab Saudi.

Dengan demikian, peneliti beranggapan bahwa penyelesaian konflik Arab Saudi dan Iran dengan melibatkan Organisasi Kerja sama Islam cenderung memiliki tujuan tersendiri. Adapun tujuan yang dimaksud adalah Arab Saudi ingin mengubah posisinya terhadap keberadaan Organisasi Kerja sama Islam yang pada awalnya sebagai kepemimpinan yang pada akhirnya menjadi hegemoni di dalam suatu rezim internasional. Lebih lanjut, berdasarkan temuan-temuan dalam skripsi tersebut, peneliti memberikan beberapa rekomendasi.

Pertama, mendesak kepada pemerintah Arab Saudi untuk segera mengakhiri intervensi melalui kekuatan militernya khususnya di Yaman dalam rangka untuk menghentikan dominasi Iran. *Kedua*, mendorong negara anggota Organisasi Kerja sama Islam untuk bersikap netral dalam menyelesaikan konflik antara Arab Saudi dengan Iran. *Ketiga*, memberikan ruang bagi Organisasi Kerja sama Islam untuk memberikan solusi terbaik dalam usahanya untuk menyelesaikan konflik Iran dan

Arab Saudi. *Keempat*, mendorong pemerintah Arab Saudi untuk menyelesaikan konflik dengan Iran melalui mediasi.

Adapun saran yang diberikan untuk penelitian selanjutnya agar memberikan suatu analisis kritis terkait konflik Iran dan Arab Saudi melalui sudut pandang geopolitik. Di satu sisi, geopolitik akan memudahkan dalam memetakan wilayah yang penting untuk memfasilitasi suatu negara dalam mencapai politik luar negeri. Di sisi lain, dengan menggunakan sudut pandang geopolitik memudahkan akademisi atau peneliti yang memfokuskan pada hubungan konflik Arab Saudi dan Iran untuk memperoleh gambaran spesifik terkait keunikan suatu wilayah yang diperebutkan oleh Iran dan Arab Saudi dengan melihat dari perbedaan identitas masing-masing negara.